



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kota Tasikmalaya telah selesai menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022, sehingga Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat disampaikan kepada Masyarakat.

RLPPD merupakan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat dan wajib memublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Adapun sistematika RLPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat :

1. Capaian kinerja makro;
2. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
3. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah;

5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran, dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan; dan
6. Inovasi daerah.

Materi atau isi RLPPD merupakan rangkuman dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 yang bersumber dari laporan tiap Perangkat Daerah yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, RLPPD juga merupakan informasi atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Dengan terselesaikannya RLPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikirannya, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Makro Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta laju kinerja dapat dilihat dalam sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI MAKRO TAHUN 2022

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	LAJU KINERJA 2022 (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,31	73,83	0,709
2	Angka Kemiskinan	13,13	12,72	-3,123
3	Angka Pengangguran	7,66	6,62	-13,577
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,57	5,01	40,336
5	PDRB Per-Kapita Harga belaku	31,56	34,05	7,890
6	Ketimpangan Pendapatan	0,414	0,405	-2,174

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

CAPAIAN IPM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

Capaian IPM tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 yaitu 73,31 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 73,83 poin pada tahun 2022.

1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperiukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Capaian Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut :

CAPAIAN ANGKA KEMISKINAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

Dari Grafik di atas dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 12,72% pada tahun 2019 meskipun mengalami penurunan menjadi 11,6%. Capaian ini masih di atas kemiskinan nasional dan provinsi Jawa Barat sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

ANGKA KEMISKINAN KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT DAN NASIONAL TAHUN 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022

1.3 Angka Pengangguran

Berdasarkan proyeksi interim hasil Sensus Penduduk BPS tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 733.467 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,32 persen dibanding penduduk tahun 2021. Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.521 jiwa/km² dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.166 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya adalah 4.005 jiwa/km².

Jumlah angkatan kerja Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebanyak 347.063 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 6,62 persen. Sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya sebanyak 4.652 orang dengan jumlah yang ditempatkan sebanyak 1.250 orang.

1.4 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Tasikmalaya Tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar 24.974,68 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 16.781,04 miliar rupiah. sebesar 16.781,04 miliar rupiah. Jika dilihat pada tiap lapangan usaha, penyumbang terbesar ada pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, diikuti lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan. Masing-masing memberikan sumbangan sebesar 21,69 persen, 15,92 persen dan 13,82 persen.

Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen. Jasa perusahaan adalah lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,01 persen. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami laju pertumbuhan paling rendah sebesar 1,60 persen. Adapun beberapa lapangan usaha mengalami perlambatan ekonomi seperti jasa keuangan dan asuransi finansial sebesar 0,85 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,02 persen serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 0,04 persen.

1.5 Pendapatan Per kapita (PDRB Perkapita)

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) metode penghitungan :

- a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga;
- b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

PDRB per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah/tahun) Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

No	TAHUN	SATUAN (Juta Rupiah)
1	2020	32,51
2	2021	31,56
3	2022	34,05

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp/Tahun) mengalami kenaikan dibanding tahun 2020, walaupun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan hingga tahun 2022 PDRB Per Kapita ADHB Kota Tasikmalaya adalah 34,05 (Juta Rp/Tahun).

1.6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Tasikmalaya digunakan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini), Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran sebagai proksi dari pendapatan penduduk. Di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 indeks gini mencapai 0,405 sedikit lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 0,414. Penurunan indeks ini mengindikasikan adanya perbaikan pengeluaran penduduk di Kota Tasikmalaya.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

2.1 Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome urusan pendidikan diukur oleh 4 IKK yaitu :

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,04	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,00	
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100,00	
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	90,51	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022

2.2 Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang di dalamnya terdapat UPTD Khusus RSUD dr. Soekarjo dan 22 Puskesmas. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome urusan kesehatan diukur oleh 14 IKK yaitu :

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	2,11	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	64,28	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,85	
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,70	
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,84	
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,70	
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	37,47	

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	31,98	
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75,59	
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,45	
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	93,57	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	99,74	
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	83,77	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2022

2.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur oleh 8 IKK yaitu:

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	35,72	
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Kota Tasikmmalaya Tidak Mempunyai Kawasan Pantai
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	37,05	
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	56,81	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,71	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	89,27	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,79	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2022

2.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur oleh 5 IKK yaitu:

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Tidak ada Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni karena tidak terjadi bencana yang ditetapkan oleh SK Wali Kota Tasikmalaya
1.d.2	Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Tidak ada hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,37	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	33,61	

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Trantibumlinmas diukur oleh 7 IKK yaitu :

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	84,78	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80,07	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65,05	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya, 2022

2.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Sosial diukur oleh 2 IKK, yaitu sebagai berikut:

NO. IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	KET
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	96,00	
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	79,88	

Sumber : Dinas Sosial Daerah Kota Tasikmalaya, 2022

3. Hasil EPPD dan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya

a) Hasil EPPD atas LPPD Pemerintah Kota Tasikmalaya :

- 1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 secara nasional yaitu dengan skor **3.3703** atau dengan Status Kinerja **Sangat Tinggi (ST)** dikeluarkan pada tanggal 25 April 2020 oleh Menteri Dalam Negeri;
- 2) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2019, 2020 dan 2021 secara nasional belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

b) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Hasil Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2021 mendapat Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**;
- 2) Sedangkan hasil Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 belum terbit masih dalam proses penilaian;
- 3) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya selama 6 (lima) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2016 s/d Tahun 2021 adalah mendapat penghargaan **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut-turut.**

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

1) Penerimaan

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.902.443.766.698,35 atau sebesar 96,52% dari Target Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.971.069.862.672,00.

2) Pengeluaran

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.912.385.803.148,68 atau sebesar 95,46% dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.2.003.436.764.110,00

5. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan dan Realisasi Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran, dan Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

a. Realisasi Penerimaan Menurut Jenis Penerimaan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	1.971.069.862.672,00	1.902.443.766.698,35	96,52
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.696.438.489,00	341.362.213.700,35	90,38
4.1.1	Pajak Daerah	168.313.162.072,00	159.043.569.254,00	94,49
4.1.2	Retribusi Daerah	17.440.517.000,00	11.877.941.377,00	68,11
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.867.043.837,00	6.867.125.110,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	185.075.715.500,00	163.573.577.959,35	88,38
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.504.619.524.263,00	1.475.175.680.746,00	98,04
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.089.000.999.537,00	1.063.555.008.009,00	97,66
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.062.233.548.537,00	1.036.787.557.009,00	97,60
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	83.695.233.096,00	85.216.383.086,00	101,82
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	740.354.626.441,00	740.031.145.102,00	99,96
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	68.281.494.000,00	65.198.688.661,00	95,49
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	169.902.195.000,00	146.341.340.160,00	86,13
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	26.767.451.000,00	26.767.451.000,00	100,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	415.618.524.726,00	411.620.672.737,00	99,04
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	136.004.614.193,00	134.992.856.376,00	99,26

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	279.613.910.533,00	276.627.816.361,00	98,93
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	88.753.900.000,00	85.905.872.252,00	96,79
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	88.753.900.000,00	85.905.872.252,00	96,79

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya

b. Pengeluaran Menurut Jenis Pengeluaran

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.003.436.764.110,00	1.912.385.803.148,68	95,46
5.1	BELANJA OPERASI	1.586.445.659.277,00	1.530.875.397.474,68	96,50
5.1.1	Belanja Pegawai	810.238.561.916,00	789.777.565.972,00	97,47
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	677.028.383.305,00	648.183.496.775,00	95,74
5.1.3	Belanja Bunga	1.000.000.000,00	20.996.181,68	2,10
5.1.4	Belanja Subsidi	385.000.000,00	142.670.000,00	37,06
5.1.5	Belanja Hibah	97.079.714.056,00	92.053.368.546,00	94,82
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	714.000.000,00	697.300.000,00	97,66
5.2	BELANJA MODAL	412.221.459.753,00	378.644.240.783,00	91,85
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.421.120.000,00	5.317.869.890,00	98,10
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.925.532.001,00	137.898.409.970,00	99,98
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.660.402.844,00	49.533.882.034,00	80,33
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	206.558.419.108,00	184.606.475.689,00	89,37
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	655.985.800,00	1.287.603.200,00	196,29
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.769.645.080,00	2.866.164.891,00	60,09
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.769.645.080,00	2.866.164.891,00	60,09

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	32.366.901.438,00	32.472.811.509,40	100,33
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	79.866.901.438,00	58.034.818.129,40	72,66

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.866.901.438,00	49.967.311.129,40	100,20
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000,00	8.062.007.000,00	26,87
6.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Dana Bergulir)	0,00	5.500.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	47.500.000.000,00	25.562.006.620,00	0,54
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.499.999.620,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000,00	8.062.007.000,00	26,87
	PEMBIAYAAN NETTO	32.366.901.438,00	32.472.811.509,40	100,33
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	22.530.775.060,01	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya

6. Inovasi Daerah

DAFTAR INOVASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022

NO.	JUDUL INOVASI	INVENTOR
1.	SIDDAKTA (Penyisiran Dokumen Dan Data Kependudukan Kota Tasikmalaya)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
2.	ASIAPP (Aplikasi Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan Puskesmas)	UPTD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya
3.	BUKIT LESTARI (Ibu Kader Ikut Entry, Status Gizi Teratasi)	UPTD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya
4.	SIABAH ASIK (Sistem Aplikasi Hibah Kesra Kota Tasikmalaya)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya
5.	PAJALE+ : eRDKK dan Bercocok Tanam dalam Genggaman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya
6.	PAK TANI : Pemasaran Hasil melalui Media Promosi Digital	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya
7.	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di IPLT Singkup	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya
8.	Pemanfaatan Teknologi Pertanian Organik JADAM Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya
9.	SAHABAT PETANI (S'TANI)	Robotech Kota Tasikmalaya

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2022

C. PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2022 bermakna penting dan strategis bagi penyelenggaraan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan, dan menjadi media komunikasi pertanggungjawaban kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya kepada masyarakat.

Dari sebagian data tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa arah pencapaian visi dan misi Kota Tasikmalaya telah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Namun masih perlu upaya yang lebih optimal dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dan dengan dukungan dari DPRD Kota Tasikmalaya serta seluruh pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya, agar pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah kita susun sebelumnya.

Demikian RLPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 yang dapat disampaikan, terimakasih atas segala perhatiannya.

Tasikmalaya, 30 Maret 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA



Dr. CHEKA VIRGOWANSYAH, SSTP, ME.